

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara menimbulkan kontroversi berbagai pihak terutama Negara-negara di kawasan Asia Timur termasuk Amerika Serikat. Upaya-upaya Korea Utara untuk menciptakan senjata nuklir membuat kawasan Asia Timur, Amerika Serikat dan bahkan seluruh komunitas internasional menghadapi tantangan keamanan yang serius. Pada tahun 2003 negara ini menjadi Negara pertama yang keluar dari Pakta Non-Proliferasi (NPT).<sup>1</sup>

Sejak tahun 2003 telah dimulai proses perundingan enam pihak (Six Party Talks) yang bertujuan untuk menghentikan ambisi Korea Utara untuk memiliki senjata nuklir, perundingan ini melibatkan negara-negara Semenanjung Korea seperti Rusia, Jepang, China, Korea Selatan, Amerika Serikat serta Korea Utara. Namun, proses perundingan ini sering terhambat karena tidak tercapainya kesepakatan antar pihak yang terlibat perundingan.

Selama hampir tiga belas tahun mempertahankan program nuklirnya, akhirnya pada pertemuan enam pihak (Six Party Talks) putaran kelima tanggal 13 Februari 2007 yang lalu, Korea Utara bersedia menghentikan program nuklir Yongbyon. Sebelumnya sejak Desember tahun 2005, Korea Utara memboikot perundingan enam pihak. Korea Utara juga bersedia menerima kedatangan tim inspeksi Badan Tenaga Atom Internasional IAEA guna

---

<sup>1</sup> [http://www.wikipedia.org/wiki/Non-Proliferation\\_Treaty](http://www.wikipedia.org/wiki/Non-Proliferation_Treaty) diakses 17 Agustus 2007

membicarakan penutupan reaktor nuklir di negaranya. Sebelumnya Korea Utara telah mengusir tim inspeksi Badan Tenaga Atom Internasional pada tanggal 31 Desember 2002 dan penarikan diri Korea Utara dari Traktat Nonproliferasi Nuklir 9 Januari 2003. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian dengan tajuk **“Keputusan Korea Utara Menghentikan Program Nuklir Yongbyon”**.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Berakhirnya Perang Dunia II membuat negara-negara di dunia berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Kemudian dibentuk berbagai organisasi, aturan-aturan, atau perjanjian-perjanjian yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian dunia. Setiap Negara di dunia memiliki peran dalam memelihara perdamaian termasuk dalam mencegah terjadinya perang.

Stabilitas keamanan dan perdamaian secara global dimulai dari perdamaian yang tercipta di lingkungan kecil seperti perdamaian dan stabilitas di kawasan. Demikianlah akhirnya stabilitas di kawasan menjadi sangat penting. Konflik antar negara dalam satu kawasan dapat mengancam stabilitas kawasan tersebut. Konflik di kawasan tentu akan berdampak pada stabilitas kawasan sekitar yang berpengaruh pada perdamaian dan keamanan dunia.

Kawasan Asia Timur Jauh yang terdiri dari Republik Rakyat China, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara, merupakan kawasan yang sangat

Negara-negara di kawasan ini saling bersaing satu sama lain bahkan terkadang saling mengancam kedaulatan masing-masing negara. Setiap negara di kawasan ini berusaha untuk memperkuat armada militernya sehingga menimbulkan kecemasan bagi negara tetangganya. Terlebih dalam hal pengembangan program nuklir Korea Utara, Kawasan Asia Timur Jauh menjadi daerah yang menjadi perhatian dunia karena ancaman terjadinya perang.

Kepemilikan senjata nuklir suatu Negara memang menjadikan perubahan konteks politik internasional menjadi rawan konflik. Senjata nuklir memiliki nilai tawar kekuatan untuk menentukan suatu pemerintahan mempengaruhi yang lainnya, dengan kata lain nuklir merupakan instrumen kekuasaan negara yang optimal saat ini. Dengan segala kelebihan kedahsyatan daya hancurnya, senjata nuklir kemudian diakui memiliki kelebihan ekstra dibanding senjata konvensional lain berupa kemampuan penangkalan dari kemungkinan serangan lawan sekaligus prestise dan penguat posisi *bargaining* politik. Namun keberadaan nuklir dapat memunculkan permasalahan dan ketegangan baru diberbagai belahan dunia termasuk seperti yang terjadi di Semenanjung Korea.

Program nuklir Korea Utara diindikasikan telah dimulai sejak tahun 1940-an, yang merupakan hasil proyek riset kerjasama dengan China dan Uni Soviet. Pada tahun 1960-an program ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di Yongbyon dan digunakan demi memenuhi kebutuhan listrik Korea Utara yang berkemampuan 30.000 Kw. Selanjutnya Korea Utara

memfokuskan pada riset dan pengembangan nuklir murni. Tidaklah sulit bagi Korea Utara yang memang kaya akan sumber mineral berupa batubara, bijih besi, magnesit dan grafit, bahkan sejak 1949 Korea Utara telah melakukan ekspor konsentrat biji monazit, tantalum, niobium dan uranium ke Uni Soviet. Secara faktual terang dan jelas Korea Utara mengakui kepemilikan senjata nuklir dengan program nuklir dan program misil balistiknya. Diperkirakan senjata pemusnah massal Korea Utara lebih dahsyat dibandingkan Irak. *Program Highly Enriched Uranium Nuclear* Korea Utara diperkirakan lebih berbahaya dibandingkan senjata kimia dan biologi Irak.

Senjata nuklir adalah senjata yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir dan mempunyai daya pemusnah yang dahsyat. Senjata nuklir dapat dilancarkan melalui berbagai cara, seperti melalui pesawat pembom, peluru kendali, peluru kendali balistik dan peluru kendali balistik jarak antar benua. Korea Utara dipercaya telah berhasil mengembangkan peluru kendali dan telah melakukan tes terhadap misil Rodong-1 yang bisa menjangkau 1000km. Kemudian Korea Utara mengembangkan lagi misil baru yaitu Nodong-1 dan 2 yang dapat menjangkau 2000km dan 3500km.<sup>2</sup> selain itu diketahui Korea Utara telah berhasil menciptakan peluru kendali jelajah Taepodong-2. Keberhasilan pembuatan peluru kendali tersebut tentu saja membuat cemas karena peluru-peluru kendali adalah senjata yang dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir.

---

<sup>2</sup> Barbara Star, "North Korea Casts a Longer Shadow with TD-4", Jane's Defense Weekly, March, 12, 1994, hal.1, dalam Richard D. Fisher, *The Korean Journal of Defense Analysis*, Vol. VI, No.1 Summer 1994, hal. 110

Para ahli nuklir percaya sebelum tahun 1994 Korea Utara telah memproduksi cukup plutonium untuk pembuatan satu atau dua senjata nuklir, dan bila program ini berjalan diperkirakan saat ini Korea Utara telah memiliki 5 sampai 7 senjata nuklir. Sebuah lembaga pengkajian, Institute for Science and International Security yang berpusat di Washington memperkirakan pada tahun 2008, Korea Utara akan mempunyai plutonium yang cukup untuk membuat 8 hingga 17 hulu ledak nuklir.

Senin 9 Oktober 2006, Korea Utara mengklaim telah berhasil melakukan uji coba nuklir bawah tanah. Ledakan kuat atas uji coba nuklir tersebut disinyalir terjadi di sebuah fasilitas bawah tanah di Provinsi Hamgyong Utara, Korea Utara. Berbagai ahli analisis pertahanan mempercayai bahwa Korea Utara tidak mungkin mempunyai kemampuan untuk dapat melakukan hal tersebut, tetapi sepertinya tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Korea Utara hanya sekedar melakukan gertakan politik. Baik ahli dari Russia maupun Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka percaya klaim yang telah diumumkan secara terbuka oleh Korea Utara sangat akurat dan ledakan maha dahsyat yang terjadi tersebut diperkirakan mempunyai daya ledak sekitar 15kilo ton TNT, yang secara sepiantas dapat dikatakan mendekati dengan daya ledak pada bom Hiroshima di tahun 1945.<sup>3</sup>

Usaha penghentian pengayaan plutonium Korea Utara telah dicoba Amerika Serikat sejak tahun 1994. Amerika menginginkan pengembangan senjata nuklir Korea Utara dapat diverifikasi dan kemudian dimusnahkan

---

<sup>3</sup><http://jurnalbukun.blogspot.com/2006/10/krisis-nuklir-korea-utara.html> diakses 10 Juli 2007

melalui perundingan multilateral. Pada tahun 1994, Korea Utara dan Amerika melakukan perundingan berkaitan kecurigaan Amerika Serikat atas reaktor nuklir Korea Utara yang dijalankan digunakan untuk langkah awal pembuatan senjata nuklir ataupun rudal balistik. Korea Utara menandatangani kerangka kesepakatan ( *Frame Agreement* ) penghentian program nuklir Korea Utara, dengan kesepakatan bahwa Amerika Serikat dan negara koalisinya bersedia mensuply energi lain atau pasokan bahan bakar minyak guna menjalankan reaktor nuklir air ringan dan untuk memenuhi pasokan kebutuhan rakyat Korea Utara.

Tapi kerangka kesepakatan tersebut tidak dapat tercapai. Pada tanggal 16 Oktober 2002 Amerika menuduh Korea Utara masih menjalankan reaktor nuklir yang lainnya. Akibatnya Korea Utara menolak dan mengusir petugas IAEA pada 31 Desember 2002 yang ingin memeriksa reaktor nuklir di negaranya yang pada 3 Juni 1994 telah keluar dari anggota IAEA<sup>4</sup>. Pada Januari 2003, Korea Utara menyatakan keluar dari perjanjian kerangka kesepakatan Non-Proliferasi Treaty (NPT)<sup>5</sup>, sebelumnya Korea Utara juga keluar dari keanggotaannya pada 12 Maret 1993.(Lihat Lampiran 3)

---

<sup>4</sup> IAEA (International Atomic Energy Agency) merupakan badan otonom, tetapi berada didalam system PBB sebagai suatu specialized agency dan menyampaikan laporan tahunannya kepada SMU PBB. IAEA yang bermarkas di Wina, Austria, merupakan forum utama antar pemerintah bagi kerjasama teknik dan ilmu pengetahuan dibidang nuklir. Salah satu fungsi utamanya adalah menerapkan *full scope safeguards* untuk menjamin bahwa material dan peralatan nuklir benar-benar dimaksud untuk tujuan damai dan tidak dialihkan untuk keperluan militer. Sampai tanggal 28 September 1994, beranggotakan 131 negara.

<sup>5</sup> Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Hingga saat ini keanggotaan NPT sebanyak 191 negara. Perjanjian ini memiliki tiga pokok utama, yaitu nonproliferasi, perlucutan dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.

Gagalnya kerangka kesepakatan antara Korea Utara dan Amerika Serikat tahun 1994, tidak menghentikan ambisi Amerika Serikat untuk menghentikan program nuklir Korea Utara. Pada tahun 2003 Amerika Serikat dan Negara-negara di Semenanjung Korea menggagas perundingan multilateral guna membahas proses denuklirisasi di Semenanjung Korea. Perundingan ini melibatkan Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat China, Rusia dan Korea Utara yang dinamakan perundingan Enam Pihak (Six Party Talks). Namun Korea Utara berpandangan, penghentian program nuklir harus dimulai oleh Amerika sebagai pemilik senjata nuklir terbesar, lagipula Amerika selalu menunjukkan sikap "bermusuhan" dan selalu menekan Korea Utara sehingga perundingan antar kedua negara tidak pernah mencapai kesepakatan.

Perundingan melalui jalur diplomasi demi menyelesaikan situasi krisis Semenanjung Korea menjadi sangat rumit dikarenakan kepentingan yang berbeda dari setiap negara yang terlibat perundingan. Tidak ada negara yang menginginkan Korea Utara memiliki senjata nuklir. Bagi Amerika kepemilikan nuklir oleh Korea Utara merupakan ancaman bagi perdamaian dan stabilitas dunia dan tentunya akan mengancam hegemoni Amerika di kawasan Asia Timur. Jepang, dan Korea Selatan yang merupakan tetangga dekat bersiap siaga terhadap ancaman militer Korea Utara, sedangkan RRC serta Korea Selatan khawatir akan krisis sosial dan ekonomi yang akan terjadi bila nantinya pemerintahan Korea Utara jatuh.

Pada perundingan Enam Pihak I (27-29 Agustus 2003) hingga III (23-26 Juni 2004) telah menghasilkan beberapa langkah awal dalam proses denuklirisasi semenanjung Korea. Kepala delegasi Tiongkok mengatakan bahwa pihak Korea Utara bersedia secara transparan melepaskan semua program yang bersangkutan dengan senjata nuklir dan menekankan pembekuan instalasi nuklir yang merupakan tahap pertama membatalkan program nuklir serta bersedia menerima pemeriksaan atas instalasi keberadaan nuklir menghentikan senjata nuklirnya.<sup>6</sup> Namun proses perundingan kembali menemui kemacetan dikarenakan sikap Amerika Serikat yang selalu menekan Korea Utara, hingga pada Desember 2005 Korea Utara memboikot perundingan enam pihak. Pertemuan enam pihak kembali dilaksanakan pada Februari 2007, dalam perundingan ini akhirnya Korea Utara bersedia menghentikan pengayaan program nuklir Yongbyon. Korea Utara menyatakan akan segera melucuti fasilitas pengayaan plutoniumnya dan segera menutup reaktor utamanya di Yongbyon dalam 60 hari.

### **C. Pokok Permasalahan**

Dari permasalahan yang ada penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: Mengapa Korea Utara Memutuskan Untuk Menghentikan Program Nuklirnya?

---

<sup>6</sup> <http://id.chinabroadcast.cn/1/node/2004/06/26> (GMT+08:00) 15:33:59, diakses 10 Juli 2007

#### **D. Kerangka Pemikiran/Teori yang digunakan**

Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan konsep Kepentingan Nasional dan teori Politik Luar Negeri dengan menggunakan model Aktor Rasional yang dikemukakan oleh Graham T.Allison serta Teori Resolusi Konflik.

##### **1. Konsep Kepentingan Nasional**

Konsep Kepentingan Nasional sebagaimana dikemukakan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton<sup>7</sup>:

Kepentingan Nasional sebagai tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan Nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan hidup bagi Negara, unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bagi bangsa dan Negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.

Setiap Negara pasti mempunyai kepentingan nasional sendiri-sendiri, dimana setiap kepentingan nasional itu mempunyai ciri-ciri spesifik yang menjadi acuan setiap negara. Begitupun Korea Utara yang memiliki kepentingan tertentu dalam memutuskan untuk menghentikan program nuklirnya.

Adapun kepentingan yang ingin dicapai Korea Utara dalam memutuskan untuk menghentikan program senjata nuklirnya yaitu: pertama untuk mempertahankan rejim Korea Utara. Korea Utara selalu menyatakan bahwa AS telah mencoba melemahkan sistemnya. Kedua,

Pyongyang ingin mencapai tujuan diplomatik-politik yaitu normalisasi hubungan diplomatik AS-Korea Utara termasuk normalisasi hubungan Jepang-Korea Utara. Senjata nuklir juga dapat digunakan untuk menekan komunitas internasional agar melibatkan Korea Utara dalam percaturan global. Ketiga, Korea Utara menginginkan bantuan ekonomi dari AS, Korea Selatan, Jepang dan Negara-negara Barat lainnya untuk memperbaiki ekonominya yang mengalami stagnasi. Jika Korea Utara mencapai ketiga tujuan tersebut Korea Utara menyatakan akan menghentikan program pengembangan nuklirnya.

## 2. Model Aktor Rasional

Dalam studi Hubungan Internasional, kita dapati bahwa kajian kebijakan luar negeri sangat luas dan kompleks. Kebijakan luar negeri dalam pengertian luas terdiri atas pola-pola yang diwujudkan oleh suatu negara dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan nasional, dalam hubungannya dengan negara lain atau dilakukan terhadap lingkungan eksternalnya. Politik luar negeri dapat berarti sebagai tindakan rasional (*Rational Action*) suatu negara dalam usaha memenuhi kepentingan nasionalnya di lingkungan internasional, dapat juga berarti hanya sebagai pernyataan gramatik yang diucapkan oleh para pemimpin atau penguasa suatu negara terhadap masyarakat internasional, dapat pula sebagai agregasi seluruh kepentingan dalam negeri suatu negara atau bangsa.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Takar Wicaksa, "Teori Teori Politik Luar Negeri", Yogyakarta, Bismaf, 1998, hlm. 72

Menurut model pembuatan keputusan klasik, para pembuat kebijakan membuat sebuah perhitungan dalam dua dimensi dasar manfaat dan kemungkinan dan dengan asumsi bahwa mereka “rasional” dengan memaksimalkan manfaat yang diinginkan. Model Aktor Rasional ini dapat digunakan untuk menjelaskan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin Korea Utara dalam menghentikan program senjata nuklirnya.

Menurut Graham T. Allison, sebagian besar analisis politik luar negeri memikirkan dan menjelaskan tentang perilaku pemerintah dalam kerangka Aktor Rasional atau model “Klasik”. Dalam model ini para pembuat keputusan itu dianggap rasional dan kita umumnya memang cenderung berpikir bahwa keputusan (terutama yang menyangkut politik luar negeri) dibuat secara rasional. Dalam hal ini, analisis politik luar negeri memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya. Dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif menggunakan kriteria “optimalisasi hasil” atas perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif itu. Dalam hal ini kita juga berasumsi bahwa pemerintah Negara lain itu monolit, tidak terpecah belah dan bahwa kejadian penting pasti disebabkan oleh sesuatu yang penting juga.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Graham T. Allison, *Essence of Decision* (Little, Brown, 1971); “Conceptual Model’s and the Cuban Missile Crisis,” *American Political Science Review* (September 1969); dan Allison dan Morton Halperin, “Bureaucratic Politics: A Paradigm and Some Policy Implication,” *World Politics*, Vol.24 (1972), dalam Mochtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Yogyakarta, 1994, hal.234.

Setiap negara digambarkan sebagai aktor rasional yang selalu bertindak didasarkan atas kepentingan dirinya sendiri. Dan yang paling mendasar adalah menjaga kedaulatan dan mencapai kepentingan nasional. Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan melakukan alternatif-alternatif kebijakan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Penghentian program nuklir tentu didasari dari pemikiran rasional dari Korea Utara. Dengan menghentikan program nuklirnya, Korea Utara hendak mencapai kepentingan nasionalnya. Aktor Rasional Korea Utara dalam hal ini Negara sadar bila program nuklirnya dihentikan akan lebih menguntungkan daripada bila Korea Utara tetap bersikeras untuk mempertahankan pengayaan uraniumnya.

Korea Utara bukanlah Negara yang mapan dalam kehidupan ekonomi. Laju perekonomian Korea Utara diperkirakan berjalan lambat dibandingkan Korea Selatan, pendapatan perkapita hanya sebesar \$1,900 di tahun 2007 sedangkan laju pertumbuhan hanya sebesar 1,6%.<sup>10</sup> Sejak pertengahan tahun 1990-an Korea Utara menderita kelaparan yang menewaskan dua juta warganya.<sup>11</sup> Korea Utara sulit berswasembada pangan karena masalah geografi dan kebijakan ekonomi. Negara ini memerlukan bantuan makanan rata-rata satu juta ton setiap tahun. Negara ini bukanlah negara pertanian, sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan dan hanya 18% yang bisa digarap. Dan agar tanah itu bisa produktif diperlukan pupuk dan mesin yang biayanya sangat mahal. Politik

---

<sup>10</sup> <http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kn.html>, diakses 29 Januari 2007

<sup>11</sup> <http://www.kapanlasi.com/b/0000186000.html>, diakses 20 Agustus 2007

mempersulit keadaan wilayah Korea Utara. Pertanian dikerjakan bersama pada tahun 1950-an sesuai dengan filosofi Stalin untuk bisa berdikari.<sup>12</sup> Selama ini kebutuhan pangan dan bahan bakar Korea Utara disuplai dari China sebesar 70% dan Korea Selatan 30%.<sup>13</sup> Sejak tahun 2005 Amerika Serikat dan Jepang menghentikan bantuan ekonomi untuk Korea Utara. Di tahun 2007 Korea Utara menghadapi kelangkaan pangan setara satu juta ton beras atau 20% dari kebutuhan nasional.

Keuntungan bagi Korea Utara atas penghentian program senjata nuklirnya yaitu, Korea Utara akan menerima bantuan ekonomi, energi dan humaniter. Korea Utara akan menerima paket bantuan bernilai 300 juta dolar AS serta menerima 50.000 ton bahan bakar minyak yang akan diberikan oleh negara-negara yang terlibat perundingan serta pencairan dana milik Korea Utara sebesar 25 miliar dolar AS yang sebelumnya dibekukan oleh Amerika Serikat di Banco Delta Asia.

Keuntungan lainnya yang diperoleh Korea Utara adalah normalisasi hubungan diplomatik Korea Utara dengan Amerika Serikat dan Jepang. Melalui pemulihan hubungan diplomatik ini Korea Utara memperoleh pengakuan kedaulatan sebagai sebuah negara. Dengan demikian Korea Utara bisa mempertahankan rejim komunisnya dan eksistensinya dalam percaturan global.

---

<sup>12</sup> [http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2005/06/050614\\_korealapar\\_shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2005/06/050614_korealapar_shtml), diakses 20 Agustus 2007

<sup>13</sup> [http://dunya.de/indonesian/Topic/1\\_200224\\_1.html](http://dunya.de/indonesian/Topic/1_200224_1.html), diakses 20 Agustus 2007

Berikut tabel perbandingan keputusan yang diambil Korea Utara bila menghentikan atau tetap mempertahankan program militernya dengan keuntungan atau kerugian yang didapat.

**Tabel I.1**  
**Perbandingan Keuntungan dan Kerugian Bagi Korea Utara Bila Menghentikan atau Mempertahankan Program Nuklir Yongbyon**

	<b>KEUNTUNGAN</b>	<b>KERUGIAN</b>
<b>Menghentikan Program Nuklir Yongbyon</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mendapatkan bantuan ekonomi, energi dan humaniter senilai 300 juta dolar AS</li> <li>➤ Pemulihan hubungan diplomatic dengan Amerika Serikat dan Jepang</li> <li>➤ Jaminan keamanan dari Amerika Serikat</li> <li>➤ Pencairan dan Korea Utara sebesar 25 milliar dolar AS yang dibekukan di Bank Delta Asia di Macau</li> <li>➤ Penghapusan nama Korea Utara dari daftar Negara "poros setan"</li> <li>➤ Pencabutan sanksi dan embargo ekonomi</li> <li>➤ mendapatkan sumber energy listrik melalui pembangunan reactor nuklir air ringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kehilangan fasilitas reaktor nuklir</li> <li>➤ kehilangan sumber energy berbasis nuklir</li> <li>➤ penghentian kegiatan fasilitas nuklir Yongbyon akan berpengaruh terhadap kekuatan militer non konvensional Korea Utara. Disinyalir kekuatan militernya akan melemah.</li> </ul>
<b>Tetap Menjalankan Program Nuklir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tetap memiliki fasilitas nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik dan mempertahankan kekuatan militernya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Korea Utara akan semakin dikucilkan dari percaturan global</li> <li>➤ Penerapan sanksi dan embargo ekonomi yang akan memperburuk perekonomian Korea Utara</li> <li>➤ Ancaman serangan militer oleh Amerika Serikat.</li> </ul>

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Pyongyang akan mendapatkan keuntungan lebih banyak bila menghentikan program nuklirnya. Tetapi bila Korea Utara tetap bersikeras untuk mempertahankan program nuklirnya, maka Pyongyang akan mendapat lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Maka sangat rasional bila akhirnya Pyongyang bersedia menghentikan program nuklirnya demi mendapatkan keuntungan yang sangat bermanfaat bagi kepentingan nasionalnya.

### 3. Teori Resolusi Konflik

Ada banyak pandangan mengenai sumber konflik. Menurut K.J.Holsti, salah satu sumber konflik akibat adanya perbedaan pandangan pada pemilikan suatu bagian khusus wilayah atau hak-hak yang dimiliki di Negara lain di suatu Negara tertentu.<sup>14</sup> Perbedaan pandangan dan kepentingan atas hak-hak yang dimiliki oleh suatu Negara yang dikemukakan oleh Holsti sesuai dengan akar perselisihan antara Korea Utara dan Amerika Serikat.

Gagasan Hugh Miall, et al tentang Resolusi Konflik<sup>15</sup> dapat dimulai dari pengertian konflik yaitu pengejaran tujuan saling bertentangan dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Ini menunjukkan rentangan waktu yang lebih luas dan kelas perjuangan yang lebih lebar

<sup>14</sup> K.J.Holsti, Politik Internasional, Erlangga, Jakarta, 1988, hal.147

<sup>15</sup> Penjelasan yang lebih lengkap mengenai pendekatan-pendekatan dalam penyelesaian konflik secara damai serta beberapa gagasan tentang resolusi konflik dapat dibaca selengkapnya dalam Hugh Mial, Oliver Ramsbothan dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer : Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik : Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

dibandingkan dengan konflik bersenjata, entah itu diikuti oleh sarana perdamaian ataupun dengan menggunakan kekuatan (sejumlah ahli teori membedakan antara pertikaian dengan kepentingan yang dapat dinegosiasikan dan dapat diatasi dengan kompromi, dan konflik yang lebih dalam yang melibatkan kebutuhan manusia dan hanya dapat diselesaikan dengan menghilangkan penyebab tersembunyinya).<sup>16</sup>

Resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Ini mengimplikasikan bahwa perilakunya tidak lagi penuh dengan kekerasan, sikapnya tidak lagi membahayakan, dan struktur konfliknya telah diubah.<sup>17</sup>

Resolusi konflik sebenarnya diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar yaitu dengan memberikan akses kepada pihak-pihak yang berpotensi konflik. Penyelesaian konflik tanpa kekerasan dapat dilakukan melalui negosiasi dan melibatkan peran pihak ketiga (mediasi). Tujuan penyelesaian konflik adalah mentransformasi konflik dengan kekerasan yang ada atau berpotensi untuk ada dan menjadi proses perubahan social dan politik yang penuh damai (tanpa kekerasan).

Pihak-pihak yang terkait dalam denuklirisasi semenanjung korea telah memilih opsi untuk melakukan negosiasi. Esensi dari negosiasi (perundingan) ini adalah kepentingan bersama pihak-pihak yang terkait

<sup>16</sup> Hugh Mial, Oliver Ramsbothan dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer : Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik : Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal.28-29

<sup>17</sup> *ibid*, hal.31

guna menghindarkan kekerasan atau jika telah terjadi untuk mengakhirinya. Tanpa kepentingan bersama minimal ini, tidak mungkin ada kompromi.<sup>18</sup>

Opsi negosiasi yang ditempuh dalam proses penghentian nuklir Korea Utara termasuk mengupayakan jalur bilateral dan multilateral untuk menyelesaikan konflik tersebut. Jalur bilateral yang telah pernah ditempuh adalah kesepakatan Agreed Framework di tahun 1994 antara Korea Utara dan Amerika Serikat dimana pelaksanaan kesepakatan tersebut berada dibawah pengawasan IAEA. Namun ternyata kesepakatan ini gagal dilaksanakan. Kemudian ditempuh jalur multilateral yang melibatkan China, Jepang, Rusia, Korea Selatan, Korea Utara dan Amerika Serikat yaitu melalui perundingan enam pihak yang nyata memang lebih bermanfaat dan berguna untuk mencapai kesepakatan walaupun sering terjadi perbedaan pandangan bahkan perdebatan antara Korea Utara dan Amerika Serikat yang sering menimbulkan konflik. Proses perundingan enam pihak ini, ternyata memang berhasil menghasilkan resolusi konflik. Dimana akhirnya tercapai kesepakatan antara pihak yang berunding dimana kepentingan-kepentingan antara pihak yang bertikai dapat dipenuhi secara damai.

Atas kesediaannya menghentikan program nuklirnya, Korea Utara mendapatkan "reward" dari pihak yang terlibat perundingan dimana Korea Utara tidak akan dikucilkan lagi dari percaturan global melalui normalisasi hubungan politik-diplomatik dengan Amerika Serikat dan Jepang dan akan

mendapatkan mendapatkan bantuan pangan, daya dan humaniter yang memang dibutuhkan Korea Utara untuk mengatasi krisis ekonomi dalam negerinya. Dengan demikian Korea Utara berhasil mencapai kepentingan nasionalnya untuk menjaga kelangsungan hidup Bangsa dan Negaranya dan mencapai kesejahteraan ekonomi. Namun bila Korea Utara tetap menjalankan program nuklirnya, maka Korea Utara akan mendapatkan “punishment”, yaitu sanksi serta embargo internasional yang tentunya hanya akan memperburuk kondisi dalam negeri Pyongyang.

#### **E. Hipotesa**

Dari pokok permasalahan yang telah dikemukakan dan dengan didukung konsep dan teori yang dapat membantu analisa, maka penulis mengajukan hipotesa: Korea Utara bersedia menghentikan program senjata nuklirnya karena Korea Utara ingin mencapai Kepentingan Nasionalnya baik secara politis maupun ekonomis. Dimana kepentingan politisnya berkaitan dengan kelangsungan hidup bagi Bangsa dan Negara sedangkan kepentingan ekonomisnya Korea Utara ingin meraih kesejahteraan ekonomi karena Korea Utara akan mendapatkan bantuan daya, pangan dan ekonomi.

#### **F. Tujuan Penulisan**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Korea Utara menghentikan program nuklir Pyongyang yang

selama 13 tahun dipertahankannya dan apa yang ingin didapatkan oleh Korea Utara melalui penghentian program nuklirnya.

### **G. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik studi literatur yang relevan dengan topik permasalahan yang diteliti. Adapun referensi yang digunakan adalah buku, berita dan artikel dalam surat kabar, artikel dalam majalah dan jurnal serta data internet.

### **H. Jangkauan Penulisan**

Penelitian ini mengambil rentang waktu dimulai dari pengembangan program nuklir Korea Utara hingga adanya pernyataan kesediaan Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya dalam perundingan enam pihak putaran kelima tanggal 13 Februari 2007 hingga berlangsungnya proses penutupan reaktor nuklir Yongbyon, yaitu sampai akhir tahun 2007.

### **I. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab pendahuluan memuat segala sesuatu yang berkenaan dengan aturan-aturan dalam penulisan skripsi, yaitu alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka

dasar teori, hipotesa, metode pengumpulan data, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : Sejarah Nuklir Korea Utara dan Perkembangannya**

Bab ini memuat tentang gambaran umum Korea Utara, sejarah Nuklir Korea Utara, Perkembangan Teknologi Nuklir Korea Utara, peran strategis nuklir Korea Utara dan ancamannya.

## **BAB III : Penghentian Program Nuklir Korea Utara**

Bab ini memuat tentang Proses Perundingan Enam Pihak, Posisi Korea Utara di Semenanjung Korea dan proses penghentian program senjata nuklir Korea Utara.

## **BAB IV : Faktor Yang Mempengaruhi Korea Utara Menghentikan Program Nuklir Yongbyon**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya, yaitu kondisi dalam negeri, perekonomian dan kemampuan militer serta hubungan Korea Utara dengan komunitas internasional.

## **BAB V : Kesimpulan**

Bab ini membuat kesimpulan pokok dari hasil pembahasan